

PRAKTIK–PRAKTIK KEBENARAN AGAMA ANALISIS KONTESTASI KOMUNITAS MUSLIM DI HADAPAN KATOLIK DI PONOROGO

THE PRACTICES OF RELIGIOUS TRUTH CONTESTATION ANALYSIS OF MUSLIM COMMUNITY BEFORE CATHOLICS IN PONOROGO

Ahmad Lutfi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo
ahmadlutfi636@gmail.com

Abstract

After the tragedy that emerged from the stronghold of the Islamic Da'wah Council in 2008, a new phenomenon emerged in the history of religion in the village of Klepu, namely the formation of a mosque forum. This forum marked a new round of the emergence of public religion in Muslims. But precisely here lies the problem—religion which is initially private has changed to become public. The focus to be analyzed in this paper is the problem of Muslim contestation. There are two issues to be discussed. First, how the mosque forum transforms religion from private to public. Second, how the mosque forum plays its capital so that it can play its contestation. This paper uses sociological approach and qualitative research. The chosen sociology theory is Pierre Bourdieu's contestation theory. From this paper we can see that the change in private religion to public coincided with the desire of the Muslim community to maintain the number of communities. Furthermore, by utilizing their economic capital, they can reduce sectarianism in the Muslim body.

Keywords: *contestation, Mosque Forum, capital symbol*

Abstrak

Pascatragedi yang muncul dari kubu Dewan Dakwah Islam pada tahun 2008, muncul fenomena baru dalam sejarah agama di desa Klepu, yakni terbentuknya forum masjid. Forum ini menandai babak baru munculnya agama publik di dalam umat Islam. Namun, justru di sini letak persoalannya—agamayang awalnya bersifat privat berubah menjadi bersifat publik. Hal yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah masalah kontestasi muslim. Ada dua persoalan yang akan dibahas. Pertama, bagaimana forum masjid mengubah agama dari privat menjadi publik. Kedua, bagaimana forum masjid memainkan kapitalnya hingga bisa memainkan kontestasinya. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi dan jenisnya penelitian kualitatif. Teori sosiologi yang akan digunakan adalah teori kontestasi Pierre Bourdieu. Dari hasil analisis bisa dilihat bahwa perubahan agama privat ke publik itu bersamaan dengan adanya hasrat komunitas Muslim untuk mempertahankan jumlah komunitas. Lebih lanjut, dengan memainkan kapital ekonomi, mereka meredam isu sektarianisme di tubuh Muslim.

Kata kunci: kontestasi, Forum Masjid, dan kapital simbol

Pendahuluan

Berawal dari peristiwa yang pernah terjadi di desa Klepu, salah satu anggota Dewan Dakwah Islam (DDI) bernama Munawar mencoba melakukan praktik puritanisasi agama dari percampuran dengan budaya lokal dengan isu khasnya, yakni *takhayul bid'ah dan khurafat*.¹ Di sisi lain, untuk komunitas gereja yang ada pada masyarakat desa tersebut, dia melakukan propaganda bahwa praktik kemanusiaan gereja

dianggap sebagai sesuatu yang bersifat misionaris.² Ungkapan-ungkapan Munawar tersebut akhirnya menjadi kemelut, baik ditingkat umat Islam sendiri maupun di komunitas Katolik. Pasca-kemelut itu, munculah keinginan bersama dari para *ta'mir* yang dimotori oleh Mustakim untuk membuat suatu ruang publik bagi adanya komunikasi bersama, khususnya bagi komunitas Islam, yang dalam kondisi itu ada ketegangan antara dua agama berbeda, Islam dan Katolik.

¹Wawancara dengan ketua forum ta'mir Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo pada tanggal 13 April 2017.

²Propaganda ini juga dibenarkan oleh kedua kubu, yakni muslim dan katolik. Wawancara pada kedua wakil agama saudara Mustakim dan Albertus Agung Pramono pada tanggal 13 April 2017.

Keinginan tersebut muncul dalam bentuk forum masjid. Forum ini rencananya bisa menjadi wadah bagi komunikasi umat Islam desa tersebut. Cara dia menyatukan itu dengan memakai simbol komunitas yang berangkat dari lembaga kemasjidan. Kemudian, kesepakatan untuk membuat ruang publik ini disepakati sekitar enam belas mushola dan satu masjid yang ada di desa itu.

Setelah forum itu terbentuk, ada satu jargon bersama diantara mereka, yakni keinginan untuk menjadikan forum ini sebagai wadah untuk “mengatasi ideologisasi aliran”, dengan menimba pengalaman dari Munawar yang sempat membuat kedua kubu bersitegang.³ Makna jargon ini kurang lebih adalah mengatasi kontestasi aliran teologis yang ada di tubuh umat Islam pada satu sisi dan kontestasi antara agama Islam dihadapan umat katolik di sisi yang lain. Pertarungan teologis antara Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam (DDI), dan lainnya yang biasanya mengambil ruang masjid sebagai arenanya, akan diredam dengan terbentuknya forum masjid tersebut. Kemudian, ketegangan antara Katolik dan Islam dengan segala gerak komunitas yang selalu dianggap aksi misionaris bisa diminimalisasi. Visi ini kemudian mengangkat satu jargon bersama yang disebut dengan “berdiri diatas semua golongan”.

Tujuh belas anggota forum ini, yang di dalamnya terdiri dari berbagai aliran teologis seperti Dewan Dakwah Islam, Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, kelompok salafi (jamaah *Jawlah* dari Temboro Magetan), dan para alumnus pondok Gontor, membuat suatu program bersama, yakni memberdayakan dan memajukan umat Islam dihadapan komunitas gereja Katolik. Dibalik program yang cukup menarik tersebut ada satu ungkapan dari ketua forum masjid bernama Mustakim yang menyatakan:⁴

“Kami ingin memajukan ekonomi komunitas Islam agar tidak mudah pindah agama hanya gara-gara persoalan ekonomi. Untuk itu, kami membuat forum masjid dan setiap bulan kita tarik iuran bersama. Setelah itu, kami belanjakan dalam bentuk kambing atau ternak lain agar dipakai sebagai modal

³Wawancara dengan ketua forum masjid pada tanggal yang sama dengan sebelumnya.

⁴Ungkapan di atas kami peroleh dari hasil wawancara dengan pak ketua forum masjid desa Klepu pada tanggal yang sama dengan sebelumnya.

ekonomi warga muslim yang kurang mampu. Kami tidak menyumbangkan modal kami kepada komunitas gereja demikian juga komunitas gereja kepada kami, karena masing-masing berusaha agar tidak dianggap misionaris.”

Bahkan, terpilihnya kepala desa yang beragama Islam hari ini juga atas peran kami, yang pada masa sebelumnya selalu dari umat Katolik. Yang jelas, kami akan memajukan umat kami sendiri dan gerejapun juga demikian.”

Dalam forum masjid ini tidak boleh membicarakan atau memaksakan kebenaran aliran yang ada, seperti NU, Muhammadiyah, DDI, dan salafi. Kelompok ini didirikan atas kepentingan bersama dan ingin berdiri di atas semua golongan”.

Ungkapan seperti, “kami akan memajukan ekonomi komunitas” dan “terpilihnya kepala desa yang beragama Islam hari ini juga atas peran kami” adalah ungkapan yang menandai pertarungan dan keinginan untuk menjadi supremasi atas nonmuslim. Hanya saja manifestasinya tidak lagi pada persoalan akidah, ketika Islam merasa masuk surga dan Katolik atau umat lain akan masuk neraka, juga bukan lagi ke persoalan isu klasik aliran yang mempersoalkan masalah kemurnian agama, tapi beralih ke persoalan sosial ekonomi. Pengambilan ruangnya tidak lagi berada di masjid dalam bentuk retorika dakwah para *muballig* yang menyuarakan kebenaran dalam panggung dan mimbar melainkan dalam ruang sosial, yang bentuknya penciptaan akses-akses ekonomi.

Aspek inilah yang menarik dalam tulisan ini. Sisi menariknya adalah beralihnya motif-motif komunitas Islam setelah terbentuknya ruang publik. Setelah penulis mengamati tentang pembentukan ruang publik ini, muncul satu pertanyaan, kenapa Islam yang pada awalnya adalah sebuah kebenaran keyakinan yang bersifat privat telah beralih menjadi agama publik sebagaimana terlihat dalam forum tersebut? Dari perubahan ini, agama tidak lagi berada dalam ruang privat lagi, seperti kebenaran keyakinan *akidah ahlussunnah* atau bukan, bukan juga persoalan fikih *furu'iyah*, bahkan bukan pula persoalan tasawuf dan *sathahat-sathahatnya*, tetapi telah beralih ke ruang publik, seperti politik dan ekonomi.

Dalam teori *publik sphere*-nya Habermas (Calhoun, 1992: 1-50), ruang publik adalah wahana berkumpulnya individu untuk membicarakan

kepentingan bersama. Dalam ruang ini pula tersimpan satu perlawanan bersama terhadap kelompok tertentu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan individu-individu yang sedang berkumpul itu. Dalam ruang ini pula terbentuk sebuah model “eksklusi” atas kelompok tertentu. Modus pemikirannya adalah marginalisasi atau penyingkiran bagi kelompok lainnya, yang dianggap bertentangan dengan visi komunitas dalam ruang publik tersebut. Dengan perspektif *public sphere*-nya Habermas, slogan “mengatasi ideologi aliran” dan “berdiri di atas semua golongan” adalah bagian dalam membangun kepentingan bersama berhadapan dengan komunitas publik lain seperti komunitas Katolik. Oleh karena itu, dalam ruang publik ini kelompok di luar muslim akan disingkirkan dan dimarginalisasi. Kemudian, dalam internal muslim sendiri, aliran teologi seperti NU, Muhammadiyah, DDI, dan Salafi dianggap sebagai ruang privat yang dilarang untuk dibicarakan. Untuk menyembunyikan motif marginalisasi itu dibuat satu jargon bersama “berdiri di atas semua golongan”. Sehingga dengan slogan ini membicarakan kebenaran aliran adalah terlarang. Hal itu karena aliran tersebut masuk dalam persoalan privat dan membincangkannya akan mengganggu persoalan publik, sehingga persoalan privat aliran menjadi urusan masing-masing dan dibatasi modus penyebarannya.

Dengan meminjam perspektif *public sphere*-nya Habermas, maka forum masjid dan segenap gerakan-gerakannya yang muncul darinya pada dasarnya adalah sebuah kontestasi itu sendiri—kontestasi-kontestasi praktik kebenaran agama yang telah beralih ke ruang publik. Sebuah ruang publik yang dibuat demi terciptanya kompetisi antara muslim dan Katolik. Dari argumen ringkas ini, maka tulisan ini mengambil fokus penelitian tentang bentuk-bentuk kontestasi yang telah mengubah agama dari persoalan privat menjadi persoalan publik. Ruang publik ini sebagaimana terlihat pada terciptanya forum untuk menjadi panggung bagi umat muslim di Desa Klepu. Sebuah bentuk kontestasi atau praktik kebenaran yang tidak lagi melakukan pemaksaan kebenaran aliran teologi sebagai modus gerakan, yang sedang marak di akhir-akhir ini, tetapi telah beralih ke penjagaan kuantitas komunitas Muslim di satu sisi, dan mengatur gerak komunitas itu berhadapan dengan Katolik dalam wilayah ekonomi dan politik di sisi yang lain.

Dari uraian ringkas di atas, penulis menggunakan metode penelitian dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi dan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan sosiologi menggunakan teori kontestasi Pierre Bourdieu sedangkan penelitian kualitatifnya dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil data verbalnya. Dari data verbal itu akan digunakan untuk mengungkap focus yang hendak kami teliti, yakni “kontestasi kebenaran agama”.

Dalam kontestasi tersebut akan dibahas dua unsur dalam teori kontestasi, yang dua unsur itu dituangkandalam turunan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana “kapital simbol” forum masjid, yang mengubah agama dari awalnya bersifat privat telah berubah menjadi bersifat publik? *Kedua*, Bagaimana forum masjid memainkan “kapital ekonomi” mereka dalam arena (*field*) masyarakat Klepu? Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menelusuri cara-cara kontestasi simbol Islam dihadapan Katolik yang cara-cara itu telah mengubah agama yang pada awalnya bersifat privat beralih menjadi bersifat publik serta mengungkap cara-cara forum masjid memainkan simbol mereka dalam kontestasinya berhadapan dengan Katolik.

Adapun kontestasi kebenaran agama pada komunitas Katolik tidak dibahas dalam tulisan ini karena dua alasan. *Pertama*, karena keterbatasan ruang dalam tulisan ini dan untuk lebih memfokuskan perhatian pada komunitas muslim saja. *Kedua*, karena adanya *trend* isu, yang selama ini melekat dalam umat Islam, tentang kebangkitan politik identitas Islam. Untuk itu, kami memilih komunitas muslim saja sebagai objek penelitian.

Teori Kontestasi Pierre Bourdieu

Tulisan ini akan membahas tentang kontestasi forum masjid di desa Klepu dalam rangka kontestasinya sebagai komunitas elit lokal desa. Teori kontestasi ini digunakan untuk mengkerangkai sebuah penjelasan yang berkaitan dengan eksistensi forum masjid beserta segenap kiproahnya.

Untuk meneliti tentang bagaimana model kontestasi dari kontestan “forum masjid” berhadapan dengan kelompok Katolik yang ada, maka penulis menggunakan teori kontestasi yang dipelopori oleh Pierre Bourdieu. Dalam teori kontestasinya, ada dua unit analisis, yakni

“arena” dan “*capitalsymbolic*” (Bourdieu, 1996:169). Dalam penjelasannya tersebut, Bourdieu membingkainya dalam konsep *habitus*. *Habitus* ini adalah kebiasaan-kebiasaan tertentu bagaimana tujuan itu dicapai. Penjelasan masalah *habitus* ini sebagaimana dia ungkapkan dalam kalimat berikut.

“*system of durable transposable disposition, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is as principles which generates and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or express mastery of the operation necessary in order to attain them.*” (Swartz, 2002: 169).

(“Sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan (*transposable*), struktur yang distrukturkan yang diasumsikan berfungsi sebagai penstruktur struktur-struktur (*structured structures predisposed to function as structuring structures*), yaitu sebagai prinsip-prinsip yang melahirkan dan mengorganisasikan praktik-praktik dan representasi-representasi yang bisa diadaptasikan secara objektif kepada hasil-hasilnya tanpa mengandaikan suatu upaya sadar mencapai tujuan-tujuan tertentu atau penguasaan cepat atas cara dan operasi yang diperlukan untuk mencapainya).

Dalam ungkapannya tentang “sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan”, maknanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh para agen yang sedang ingin berkuasa dalam rangka memanfaatkan kebiasaan dirinya untuk menjadi supremasi. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang bangsawan desa untuk mengukuhkan dominasinya adalah dengan cara menempuh pendidikan formal yang tinggi. Dengan pendidikan formal itu dia mempunyai gaya bicara dan gaya negosiasi tertentu sehingga dipandang sebagai elit yang sah dan legitimate untuk kelas penguasa. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa dialihpindahkan ke generasi-generasi setelahnya secara terus menerus. Kemudian kebiasaan itu menjadi “skema persepsinya” bahwa menjadi penguasa haruslah mempunyai pendidikan tinggi. Pemikiran ini menjadi skema persepsi yang terus menerus dan berjangka panjang. Kemudian kesadaran ini menjadi budaya dan akan ditransmisikan secara terus menerus (*transposable*). Kemudian dari simbol ini akan ditunjang dengan kebiasaan seperti

dermawan. Sifat ini menjadi simbol ekonomi dalam kaitannya untuk bisa menunjang menjadi elit komunitas. Dari dua simbol ini dia bisa mempengaruhi, mendominasi, dan bahkan mengarahkan kecenderungan sosial.

Kebiasaan-kebiasaan kaum elit bangsawan tentu berbeda dengan kebiasaan yang ada pada kelompok lainya, misalnya kelas buruh dan kelas menengah. Jika meminjam model kelasnya Karl Marx, kebiasaan dan cara-cara mereka mengukuhkan dominasi kuasanya mengikuti struktur kelas yang melekat pada dirinya. Kelas borjuis yang bergerak dalam sektor produksi punya kebiasaan sendiri, demikian juga kelas proletar. Oleh karena itu, kebiasaan merupakan ciri khas yang bertahan lama (*durable*) dan bisa dialihpindahkan (*transposable*), baik itu disadari atau tidak, sejauh kelas borjuis itu masih melekat pada dirinya.

Selanjutnya, *habitus* ini tidak bisa dipisahkan dengan konsep Bourdieu tentang arena (*field*). Konsep arena ini pada dasarnya merupakan panggung bagi sebuah kontestasi kuasa-kuasa untuk mempengaruhi orang lain dalam memperebutkan dominasi. Dalam arti ini arena adalah ruang geografi, seperti wilayah desa, kota, dan negara. Muara dari arena itu adalah tempat terjadinya peristiwa untuk mencapai tujuan dominasi tertentu. Jika kontestasi kebenaran dalam arena desa, objek analisis dari teori kontestasi Bourdieu ini adalah berkaitan dengan persoalan dominasi dan cara-cara memainkan kuasa dalam lingkup desa setempat.

Karena ada ungkapan dalam forum masjid seperti perkataan Mustakim yang menyatakan, “Bahkan terpilihnya kepala desa yang beragama Islam hari ini juga atas peran kami”, maka persoalan forum masjid ini menjadi persoalan politik. Bahkan, hal ini juga terkait dengan masalah cara-cara kuasa muslim dalam rangka meneguhkan dirinya atas eksistensi lain sebagai komunitas. Dengan demikian forum masjid yang telah dibentuk oleh komunitas muslim, jika dibaca dalam kerangka ini, adalah sebuah komunitas politik pula. Indikasinya, selain ungkapan Mustakim tersebut adalah adanya semangat dalam forum itu, yakni menganggap kelompok Katolik adalah komunitas yang harus “dieksklusi”. Motif-motif eksklusi atau penyingkiran dan keinginan untuk dominan adalah cermin dari tindakan politik pula. Dengan motif itu pula, larangan untuk

membicarakan aliran dalam forum serta memaksakan kebenaran-kebenarannya dalam kancah komunitas muslim lainnya serta visi untuk berdiri di atas semua golongan adalah juga tindakan politik.

Contoh penggunaan konsep *capital* dalam arena (*field*) tertentu secara sederhana, misalnya pada zaman pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat feodal dengan pola relasi *patron-klien*. Budaya ini dimanfaatkan oleh pemerintah Soeharto untuk membentuk jalur birokrasi yang sentralistik. Hasilnya terciptalah model politik yang otoritarian selama tiga puluh dua tahun. Dalam ruang baca kondisi politik zaman Orde Baru tersebut, maka identifikasinya adalah negara dengan budaya patron-kliennya sebagai arenanya (*Field*) dan cara-cara Soeharto memanfaatkan budaya itu, dengan menggunakan simbol Jawa pada dirinya adalah aplikasi dari kapital simbolnya. Arena dan simbol itu kemudian disebut dengan kebiasaan manusia dalam rangka mencapai kekuasaannya (*habitus*). Oleh karena itu, antara arena dan simbol merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yang keduanya dicakup dalam konsep *habitus* tersebut.

Cara-cara manusia berkuasa dalam arena tertentu itu pasti membutuhkan kapital sebagai amunisi untuk bekerja. Konsep kapital ini merupakan bagian penting dalam konsep Bourdieu yang integral dalam sebuah permainan politik. Masalah kapital ini juga merupakan hal yang sangat penting. Ia tidak bisa luput dari pengamatan. Kapital itu akan dimainkan dengan strategi-strategi tertentu, baik untuk mempengaruhi dan bahkan merebut hati para anggotanya agar militan dan tercipta sebuah komunalitas. Dalam konsepnya tentang kapital, Bourdieu mengidentifikasi beberapa jenis kapital antara lain ekonomi, budaya, dan sosial (Richardson, 1986: 17-23). Jenis kapital ini akan bekerja dan efektif menurut karakteristik wilayah dan budayanya. Satu simbol tertentu belum tentu efektif jika digunakan oleh kontestan dalam wilayah yang lain. Kemudian simbol itu juga tidak akan efektif jika tidak digunakan pada proporsinya. Maka penting bagi kontestan untuk peka terhadap kultur tertentu dalam lokalitas tertentu di satu sisi dan strategi memainkan kapital itu agar efektif dalam mempengaruhi masyarakat di sisi yang lain.

Sekilas Sejarah Agama Penduduk Desa Klepu

Sejarah desa ini terbagi ke dalam tiga periode. *Pertama*, sebelum meletusnya gerakan tiga puluh September Partai Komunis Indonesia 1965. *Kedua*, masa Komunis Indonesia 1965. *Ketiga*, pasca Komunis Indonesia 1965. Sebelum masa 1965, penduduk desa ini kebanyakan penganut Islam abangan. Dalam istilah orang Klepu adalah Islam *marmoyo*.⁵ Identitas ke-Islaman mereka ditandai dengan tiga istilah yakni sunat, rabi, dan mati. Identitas Islam belum menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan pendorong kesadaran mereka, tetapi hanya sebatas kulit saja. Unsur yang paling melekat dalam kesadaran mereka adalah *kejawen* dengan sekian variasi yang ada di dalamnya.⁶ Namun kesadaran *kejawen* ini tidak juga menjadi kesadaran yang utuh ketika pemeluknya memperhatikan detail-detail ajaran yang dianutnya, tapi hanya sebuah identitas untuk menyebut keberagaman mereka—penganut *kejawen* tulen bukan dan Islam yang taat juga bukan. Dengan kata lain, agama pada masa ini bukan menjadi perhatian utama, walaupun agama *kejawen* itu sendiri merupakan sebutan yang melekat pada mereka. Perpaduan antara unsur *kejawen* dan ke-Islaman sebagai identitas agama, kendati keduanya hanya sebagai identitas, menjadikan mereka disebut sebagai abangan (*marmoyo*).

Periode *kedua* adalah masa 1965, bertepatan dengan meletusnya gerakan 30 September tahun 1965. Pada masa itu terjadi perubahan identitas keberagaman masyarakat Klepu. Perubahan ini karena ada dua faktor. Faktor *pertama* adalah karena adanya politik Orde Baru yang pada waktu itu mempersoalkan identitas agama mereka. Misalnya ketidakjelasan identitas agama menjadikan mereka akan absah untuk disebut sebagai komunis. Penyebutan ini akan menjadikan mereka teridentifikasi sebagai orang yang legal untuk dibunuh pada tragedi tahun 1965 tersebut. Dengan kondisi itu menjadikan mereka harus memilih agama demi untuk menyelamatkan jiwa. Faktor *kedua*, adanya putra dari sesepuh desa, yakni paman mantan lurah desa Klepu Albertus Agung Pramono, yang

⁵Sebutan *marmoyo* dan informasi ini kami peroleh dari Suwandi warga desa yang menjadi anggota forum masjid pada tanggal 30 April 2017.

⁶Variasi *kejawen* dalam Islam abangan Desa Klepu antara lain Islam Sapto Darmo, Islam Sumarah, dan Islam Padang Peteng. Wawancara dengan Mustakim tanggal 13 April 2017.

saat itu dipilih oleh gereja untuk disekolahkan di sekolah seminari di Surabaya karena kecerdasannya.⁷ Sekembalinya dari sekolah seminari itu, dia mendapat sambutan hangat dari penduduk, mengingat keluarga dari Pramono ini terpendang di mata masyarakat. Hal itu karena memiliki tanah pertanian yang cukup luas dibanding yang lain dan sebagian mereka bekerja sebagai petani penggarap di keluarga tersebut.⁸

Dari faktor keharusan memilih agama karena adanya tuntutan Orde Baru di satu sisi dan adanya figur baru yang muncul di sisi yang lain, maka kedua faktor ini menjadi pemicu bagi pemilihan agama Katolik sebagai pilihan sebagian penduduk. Alasannya sangat sederhana. Agama Katolik tidak rumit dan beban agamanya tidak banyak. Dengan adanya kedua faktor tersebut, maka hampir serempak masyarakat Klepu berubah menjadi Katolik.⁹

Sementara itu, keberadaan Islam yang taat pada waktu itu masih sangat kecil sekali, yakni hanya diwakili oleh orang yang bernama Pak Kurdi. Dia membangun masjid di Dukuh Ngapak dan merupakan masjid tertua di desa tersebut. Pembelajaran Islam pada waktu itu berkuat pada mengaji al-Qur'an dan *ubudiyah* saja.¹⁰ Kemudian ditambah dengan pelayanan kepada penduduk sekitar jika ada keluarga yang meninggal maka santri sekitar Masjid Ngapak ini melayani tahlil.

Di masjid Ngapak inilah cikal bakal perkembangan Islam yang ada di desa Klepu.

⁷Wawancara dengan Albertus Agung Pramono pada tanggal 20 April 2017.

⁸Pilihan untuk beragama Katolik oleh penduduk setempat alasannya cukup sederhana, yakni agama Katolik ini tidak rumit sebagaimana Islam, yang beban ibadahnya cukup banyak. Wawancara dengan mantan kepala desa, Albertus Agung Pramono dan beberapa penduduk sekitar di rumahnya pada tanggal 20 April 2017. Karena identitas keberagaman penduduk pada waktu itu masih Islam abangan, maka keterikatan mereka terhadap Islam kecil sekali dan menjadikan mereka dengan mudah untuk memilih agama Katolik.

⁹Jejak penganut agama Islam yang taat pada masa itu, dari hasil penelusuran penulis masih satu orang yakni pak kurdi. Pak kurdi ini mengajarkan ngaji kepada dua santrinya yakni Mustakim dan Saleh Hayat. Dari kedua murid dan guru ini akhirnya merintis masjid pertama di desa, yakni masjid Ngapak yang kebetulan alirannya adalah Muhammadiyah.

¹⁰Wawancara dengan Saleh Hayat sekaligus menantu dari Kurdi pada tanggal 30 April 2017.

Kemudian dari murid ngaji pak Kurdi serta putra dan menantunya, komunitas Muslim terjaga eksistensi ke-Islamannya. Sementara itu, di luar lingkup keluarga dan santri pak Kurdi ini, adalah masyarakat yang hidup dengan keberagaman yang masih abangan.

Periode *ketiga* adalah pascatahun 1965. Periode ini dimulai dari titik Masjid Ngapak. Para menantu dan santri dari Pak Kurdi kemudian berkembang. Mereka mendirikan masjid-masjid yang lain di desa ini. Dari sini Islam mulai menjadi identitas yang jelas dan menjadi kontestan baru dalam hal perkembangan agama berhadapan dengan komunitas Katolik dari keluarga Albertus Agung Pramono. Dari keluarga Pak Kurdi ini pula berkembang komunitas keberagaman NU. Kemudian ada salah seorang murid ngaji dari Pak Kurdi bernama Pak Mustakim, yang darinya mengembangkan Islam model Gontorian. Kemudian didukung oleh teman sejawatnya bernama Pak Suwandi yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (guru agama sekolah dasar) yang ditempatkan di desa Klepu mengembangkan Islam dengan corak Gontorian. Selain dari kedua orang tersebut, Dewan Dakwah Islam masuk pada sekitar tahun 1985-an dan kemudian Jamaah Salafiah Temboro pada tahun sekitar 2000-an. Empat corak ke-Islaman dengan model aliran yang berbeda-beda tersebut menyatu dalam komunitas "forum masjid" dan yang dirintis oleh Pak Mustakim sebagai pelopornya. Kelompok ini menjadi kontestan baru dalam hal keberagaman dalam hal merespon eksistensi perkembangan agama Katolik yang lebih dahulu berkembang di desa tersebut.

Menelusuri Simbol Kontestasi Forum Masjid

Forum masjid yang ada di desa Klepu ini merupakan forum yang relatif baru. Forum ini didirikan oleh komunitas muslim pada tahun 2008. Berdirinya diawali dari peristiwa yang dilakukan oleh salah seorang personel dari komunitas muslim Dewan Dakwah Islam bernama Munawar, yang mencoba melakukan tindakan puritanisasi komunitas muslim dalam hal ibadah-ibadahnya. Dengan tindakan ini maka secara otomatis, komunitas muslim yang paling terkena dampak dari tindakan personel DDI ini adalah NU, dikarenakan jumlah masyarakatnya mayoritas.

Di lain pihak, Munawar ini juga sering menyuarakan isu kristenisasi pada kelompok gereja ketika mereka menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, tindakan gereja ini dianggap upaya kristenisasi

yang harus diantisipasi dan dibendung karena mengancam keberagaman Islam secara kuantitas. Sementara itu, menurut Albertus Agung Pramono –salah satu tokoh desa setempat–tindakan itu bagian dari program gereja dalam rangka menyalurkan “kasih” antarsesama. Sementara itu, menurut Mustakim–salah satu tokoh Muslim–justru tidak strategis. Dengan demikian, menurut pandangan saya tindakan yang dilakukan oleh Munawar ini merupakan representasi dari penghayatan subjektif akan keagamaannya, yang itu memposisikan dirinya sebagai petarung tunggal (*single fighter*), baik berhadapan dengan Islam atau dengan komunitas gereja. Peristiwa ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kelompok Muslim sendiri untuk mengubah arah perjuangan agama untuk tidak seperti apa yang ditampilkan oleh Munawar.

Hal ini terbukti ketika ada jamaah *khuruj* dari salafiyah Temboro Magetan menawarkan pengajian di beberapa masjid yang ada di daerah Klepu, tetap mereka terima. Namun, dengan konskuensi tidak boleh mendakwahkan isu kebenaran aliran yang bersifat privat dalam forum tersebut. Karena hal itu justru akan mengganggu visi awal yang telah dimusyawarahkan dalam rangka pembentukan ruang publik bersama. Kemudian adanya kegiatan rutin yang ada di masjid NU berupa *dzikru al-gofilin* dan *manaqibanyang* tetap dihormati oleh anggota forum yang ditandai dengan dihadiri bersama oleh kelompok DDI dan Muhammadiyah sebagai acara yang tidak dianggap acara aliran dan demi menjaga keberlangsungan ruang privat bagi aliran masing-masing.¹¹

Dari sisi ini, ada peluang yang belum pernah dimainkan oleh komunitas muslim selama ini, yakni adanya sebuah gerakan bersama tetapi tidak dalam bentuk memanggungkan kebenaran aliran melainkan dalam bentuk sosial. Dari bentuk sosial ini, wajah aliran Islam bisa ditutupi. Karena penunggalan kebenaran privat dalam Islam hanya akan mengacaukan internal Islam sendiri dan rapuh dihadapan Katolik.¹² Dari sini

¹¹Dari fenomena ini tampak wilayah yang dieksklusi bersama demi tetap terselenggaranya ruang publik, yakni kebenaran dalam ruang privat tetap dihormati asalkan tidak kebenarannya tidak dibawa pada ruang publik, karena ruang publik sudah punya kebenaran-kebenaran sendiri.

¹²Variasi aliran di tubuh Katolik bisa dikatakan tidak ada karena hanya satu keluarga yang menganut protestan, yakni keluarga dari Supri saja.

habitus kontestan Muslim bisa dimainkan karena struktur sosial yang ada di desa Klepu menolak untuk menerima kontestasi kebenaran aliran Islam. Pertanyaannya, bagaimana forum masjid menggunakan peluang tersebut dan menggunakan kapitalnya?

Dilihat dari sisi anggota forum masjid ini, mereka adalah para pengurus *ta'mir* yang ada di seluruh desa Klepu. Jumlah masjid dan mushola yang ada di desa tersebut sekitar tujuh belas dengan perincian aliran, lima belas adalah masjid yang berhaluan NU, satu masjid DDI, dan satu masjid Muhammadiyah. Dari sisi pendidikan (*capital symbol*), para *ta'mir* ini sudah mempunyai gelar, yakni sarjana, sedangkan dari sisi mata pencaharian mereka rata-rata adalah guru agama di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas.

Dari masjid yang berhaluan NU ada sekitar dua *ta'mir* yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren (*capital symbol*) sedangkan tiga belas yang lain berasal dari pendidikan formal agama seperti madrasah aliyah dan melanjutkan ke perguruan tinggi agama Islam. Sementara itu, *ta'mir* masjid yang berhaluan Muhammadiyah bukan lulusan dari perguruan tinggi agama Islam, tetapi seluruh anaknya disekolahkan di pesantren Gontor. Kemudian anggota kelompok DDI adalah orang yang berasal dari pendidikan umum tetapi banyak mengenyam ajaran agama yang didakwahkan di masjidnya dari kelompok al-Falah Surabaya yang rutin diadakan setiap minggu.¹³

Berangkat dari tragedi Munawar yang berasal dari DDI ternyata kelompok DDI sendiri tidak menyepakati tindakan yang pernah dilakukannya. Dari ketidaksepakatan tersebut, maka kelompok DDI bersedia bergabung dengan forum masjid.

Dilihat dari kelas sosial, anggota forum masjid ini merupakan komunitas kelas menengah (*middle class*) terdidik, karena mereka rata-rata pernah mengenyam pendidikan tinggi dan bekerja sebagai guru. Status sosial mereka juga tinggi, yang ditandai dengan adanya kepercayaan

Wawancara dengan Albertus Agung Pramono 13 April 2017.

¹³Dari masjid DDI ini pengajaran agamanya sering diampu dari masjid al-Falah Surabaya. Wawancara dengan pak Mustakim selaku ketua forum masjid dan mantan kepala desa Albertus Agung Pramono pada tanggal 13 April 2017.

masyarakat untuk mendudukkannya sebagai *ta'mir* masjid yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, para anggota tersebut bisa disebut sebagai elit strategis (Nurcholis, 1997:92) yang punya akses untuk mempengaruhi banyak orang dalam hal menentukan kecenderungan sosial. Habitus “elit strategis” ini membuat mereka memungkinkan untuk memainkan peran untuk menjadikan Islam sebagai agama publik. Dengan gelar “terdidik” dan mempunyai status sosial tinggi, maka akses ke ruang publik menjadi lebih terbuka. Salah satu aspek yang bisa dimainkan adalah mempengaruhi massa untuk terciptanya forum masjid dan juga melakukan segenap “eksklusi”.

Dari sisi ekonomi (kapital ekonomi), para *ta'mir* ini juga tergolong kelompok menengah. Selain banyak yang berprofesi sebagai guru pegawai negeri sipil, banyak diantara mereka yang mempunyai sawah dan ladang sebagai usaha sampingan disamping profesi mereka sebagai guru tersebut. Kelas ekonomi ini menjadi kapital tersendiri bagi individu-individu *ta'mir* dalam perannya sebagai elit strategis di wilayah *ke-ta'mir*-annya. Bahkan, hal ini menjadi model kapital yang bersifat harkat dan martabatnya (*human dignity*) sebagai individu yang mandiri dalam hal bertahan hidup. Hal ini mengingatkan kecenderungan umum masyarakat sekarang akan menghargai individu jika mereka secara ekonomi mempunyai kelebihan dari yang lain.

Dari sisi generasi kedua (*second line*), mereka tetap mempercayakan pendidikan anak-anak mereka untuk menjadi santri di pesantren atau perguruan tinggi agama Islam. Hal ini bisa dipahami bahwa keabsahan bicara kebenaran agama dalam forum masjid tersebut tetap dipegang oleh mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren atau perguruan tinggi agama Islam. Oleh karena itu, untuk melanggengkan kuasa agar tetap absah bicara kebenaran, banyak dari anak-anak mereka masuk ke pesantren, khususnya Gontor dan pesantren lainnya di Ponorogo. Di sisi yang lain, karena adanya kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan barisan pertahanan agamaberhadapan dengan komunitas Katolik.

Forum masjid sebagai agama publik, dengan anggota yang dari sisi habitusnya adalah kelompok yang punya status tinggi, ada peran yang dimainkan, yakni peran politik. Dalam kaitannya dengan peran politik, ketua forum masjid, dalam hal ini adalah Mustakim, mengaku dalam pemilihan kepala pada tahun 2015 telah

melakukan pengorganisasian massa untuk terpilihnya kepala desa yang beragama Islam. Isu yang diangkat dalam rekayasa politik pada waktu itu adalah pergantian kekuasaan atas Islam setelah sebelumnya, semenjak tahun 1965 sampai 2015, kepala desa selalu dari agama Katolik. Dalam survey singkat penulis, komposisi pemerintahan desa seringkali didominasi oleh Katolik dengan satu saja dari pemerintahan tersebut yang bergama Islam, yakni *kamituwo*. Setelah terjadinya kasus hukum yang menimpa Albertus Agung Pramono sebagai kepala desa tersebut, maka isu agama dicoba untuk dimainkan oleh forum masjid ini untuk mengangkat *kamituwo* yang beragama Islam tersebut. Dengan adanya habitus yang ada pada para elit di dalam forum masjid ini, ternyata isu agama sangat efektif mempengaruhi massa hingga menjadikan *kamituwo* menjadi kepala desa serta memperbanyak komposisi pemerintahan dengan personel yang beragama Islam setelah sebelumnya mayoritas personil beragama Katolik.

Dalam hal ini, isu agama pertama kali digunakan dalam sejarah pemilihan kepala desa Klepu. Pada masa sebelumnya, isu politik yang sering dimainkan oleh kelompok Katolik adalah isu “sesepuh desa”. Isu ini terus dimainkan oleh kelompok Katolik yang kemudian menjadikan kepala desa, dari tahun 1965 sampai jatuhnya Albertus Agung Pramono pada tahun 2015, selalu dari kubu Katolik. Makna isu “sesepuh desa” dalam pengalaman sejarah desa Klepu memiliki kekhasan tersendiri. Hal itu berawal dari tindakan penyelamatan diri mereka pada masa tragedi 1965, ketika mereka harus memilih agama untuk menyelamatkan jiwa.¹⁴ Karena kelompok Katolik memberikan perlindungan agama tersebut, maka mereka disebut sebagai sesepuh desa.

Makna “sesepuh desa” terpelihara dengan baik. Isu politik ini terus menerus dirawat dalam perilaku mereka, yang berasal dari kakek keturunan Agung Pramono ke atas, sehingga jalur keturunan dari Agung Pramono ini dianggap sebagai keluarga yang sangat dihormati oleh masyarakat, dan sekaligus figur “pengayom” masyarakat. Akibatnya secara politis ini menguntungkan pihak Katolik. Keuntungan ini kemudian dimanfaatkan untuk menjaga dinasti

¹⁴Dalam cerita yang berkembang, salah satu identifikasi orang disebut PKI atau bukan adalah beragama. Karena awalnya penduduk desa Klepu adalah abangan, maka untuk menyelamatkan diri mereka ramai-ramai memeluk agama Katolik.

pemerintahan desa yang selalu dari jalur nasab sesepuh desa tersebut. Dari sinilah asal muasal mengapa pemerintahan desa selalu berasal dari keluarga Albertus Agung Pramono yang Katolik.

Oleh karena itu, untuk gerakan kontestasi komunitas Muslim berhadapan dengan Katolik, pertama kali memprioritaskan pada pengukuhan komunitas terlebih dahulu. Upaya itu dilakukan dengan melarang berbicara kebenaran aliran, karena akan mengganggu visi politik forum tersebut yang lebih peduli terhadap masalah jumlah komposisi personil beragama Islam dalam pemerintahan desa. Dari visi ini maka paham aliran dianggap mengganggu pengukuhan komunitas tersebut.

Setelah disepakati larangan berbicara kebenaran aliran di komunitas Muslim itu secara serempak, selanjutnya mereka mengarahkan kecenderungan forum itu untuk memandang pembagian komposisi pemerintahan desa. Aspek yang disorot bersama adalah ketidakseimbangan jumlah Muslim yang sedang duduk di pemerintahan desa. Pandangan ini misalnya tampak dalam temu langsung dengan beberapa anggota forum yang mengatakan:

”kami ini sebenarnya berjuang untuk kepentingan masyarakat muslim, entah mereka tahu atau tidak. Yang jelas, menurut keyakinan Islam kami, Islam harus mampu mengambil peran penting dalam pemerintahan, kalau tidak peran itu ya diambil mereka. Anda kan muslim juga mas. Anda kan tahu kalau agama yang benar disisi Allah ya Islam. Terus misalnya ada orang Katolik sedang membagi-bagikan bingkisan kepada Muslim, lalu mereka simpati kepada Katolik dan membantu mereka kemudian pindah ke agama mereka. Hal-hal seperti itu membuat hati gusar. Hal itu gara-gara umat Islam tidak ambil peran penting itu. Coba anda bayangkan jika Islam berada di pemerintahan, terus program-programnya diarahkan ke umat Islam, setidaknya hal yang membuat mereka pindah agama, gara-gara bingkisan, bisa ditanggulangi lewat hal yang lebih besar, yakni program tadi”.¹⁵

Dari sisi ini sebenarnya habitus forum masjid dalam memainkan isu politik sekaligus orientasi politiknya termasuk model formalisme Islam yang memangsedang marak akhir-akhir ini. Isu Islam Nusantara (Baso, 2015: X), Islam pribumi (Wahid,1996), Islam substantif (Azra,

¹⁵Wawancara dengan Mustakim ketua forum masjid pada tanggal 13 April 2017 di kediamannya.

2000), Islam inklusif (Shihab,1997), Islam Pluralis (Rahman, 2001), bahkan Islam transformatif (Abdurahman,1997), sebagai perlawanan terhadap Islam formal tidak menjadi perhatian utama dalam ruang publik komunitas Islam desa Klepu ini. Bahkan, bisa jadi gejala isu agama yang coba dimainkan oleh forum masjid ini menjadi fenomena baru bangkitnya Islam identitas, yang tidak lagi memakai baju organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah, salafisme, dan lainnya,tetapi memakai baju baru berbentuk “komunitas publik”, dengan meleburkan aliran dalam satu forum bersama.¹⁶

Oleh karena itu, adanya isu agama yang coba dimainkan oleh forum masjid ini pada hakikatnya adalah model pertautan antara “yang agama” dan “yang politis”, atau dalam bahasa idiomatiknya “*religio-politica*”. Dalam proses ini ajaran-ajaran agama dipakai untuk tujuan-tujuan politis sehingga hal yang sifatnya politis itu terlihat sebagai kebenaran agama. Praktik *religio-politica* ini pula yang menjadikan terjadinya peralihan dari agama yang awalnya bersifat privat menjadi bersifat publik. Hal itu menyebabkan adanya keterkaitan antara kuasa dan pengetahuan agama dan menjadikannya bagian integral dari cara “berkuasa dan menguasai”, yang kemudian melahirkan sikap-sikap dari pemeluk agama tersebut punya “kehendak untuk benar” (Baso, 2016: 51).

Pertautan antara pengetahuan akidah agama dan kuasa tersebut menjadikan ambisi kekuasaan politik menemukan pendasarannya dan itu berangkat dari akidah atau dorongan agama yang mereka yakini, sehingga keputusan untuk berkuasa tersebut menjadi terlihat benar secara agama. Dari sinilah lahir “*religio reason*” (nalar agama) dan juga kekuasaan untuk menjadi benar (*the power to truth*). Dengan itu,agama beralih dari bersifat privat menjadi bersifat publik.

¹⁶Istilah komunitas publik ini sengaja kami beritanda petik karena berbeda dengan gerakan Islam yang ada selama ini, seperti Hizbut Tahrir, Jama’ah Islamiyah, Salafiyah, dan yang lainnya. Sisi perbedaannya adalah organisasi-organisasi tersebut terdiri dari satu aliran dan mereka rata-rata satu doktrin bersama yang dibentuk oleh ajaran Islam tertentu. Sedangkan komunitas publik ini terdiri dari banyak aliran dan ajaran aliran yang ada di dalamnya. Mereka menyatu pada satu visi bersama, yakni meneguhkan eksistensi demi tercapainya identitas ke-Islaman berhadapan dengan agama lain.

Menyingkap Modus Kapital Ekonomi Forum Masjid

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teorinya Bourdieu, bahwa dalam permainan politik selalu dibutuhkan kapital untuk modal permainan mereka. Diantara bentuk kapital dalam pengertian Bourdieou adalah ekonomi. Sementara itu, kapital budaya dan sosial tidak diulas dalam tulisan ini, karena dua kapital tersebut dianggap cukup bisa menjelaskan aspek kontestasinya. Bagaimana forum masjid memainkan kapital ekonomi tersebut dalam arena (*field*) desa Klepu demi terwujudnya agama publik?.

Dalam kehidupan masyarakat Klepu, pengalaman relasi antaragama adalah pengalaman langsung. Maksudnya adalah pengalaman perjumpaan langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bukan relasi Islam dan Katolik yang dituliskan oleh seseorang kemudian pembacanya membayangkan secara imajinatif tentang relasi antar Islam dan Katolik. Dalam perjumpaan tersebut ada satu hambatan teologis yang tetap abadi dalam benak muslim, bahwa Katolik adalah *the other* (yang lain) di luar kedirian Muslim. Dari aspek itu kemudian muncul pengambilan satu posisi untuk kemudian menuju pada satu identitas kedirian mereka setelah memperoleh gambaran ideal tentang diri mereka hasil berkaca dihadapan *the other*. Gambaran diri sebagai “yang benar” dan gambaran *other* sebagai “yang sesat”.

Dengan pengalaman perjumpaan itu, Muslim memilih mengambil posisi berhadapan kepada Katolik. Posisi ini lahir karena didorong oleh perasaan teologis mereka akan kebenaran Islam. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana upaya komunitas muslim setelah mengambil posisi seperti itu? Dari pertanyaan ini, umat Islam yang berada di bawah pengaruh tujuh belas tempat ibadah masjid dan mushola adalah titik yang menjadi ruang permainan mereka untuk merebut pengaruh. Sebelum mendeskripsikan tentang upaya Muslim tersebut, terlebih dahulu penulis deskripsikan tentang bagaimana mengidentifikasi muslim yang ada di bawah pengaruh dari tujuh belas tempat ibadah tersebut.

Menurut pengamatan penulis, ada dua klasifikasi yang digunakan. *Pertama*, menggunakan ukuran kesantrian sederhana. *Kedua*, mengelompokkan komunitas di luar kesantrian dengan identitas abangan (Islam *marmoyo*). Dari ukuran kesantrian, komunitas muslim yang ada dalam kelompok ini adalah warga yang menjadi jamaah aktif sholat

lima waktu dan mengikuti kegiatan yang telah diprogram oleh masjid setempat. Dari ukuran kesantrian ini, jumlahnya tidak banyak. Hal itu karena jamaah terbanyak adalah sholat maghrib yang rata-rata terdiri tiga baris (*Shof*). Selain maghrib, hanya sekitar satu baris atau kurang. Jika diambil rata-rata satu shof masjid itu berjumlah 15 orang maka tiga shof jumlahnya 45 sampai 50. Kemudian 50 dikalikan tujuh belas masjid ($50 \times 17 = 850$). Jumlah 850 orang tersebut mewakili seluruh muslim dengan ukuran kesantrian sederhana seluruh desa klepu. Adapun untuk jamaah sholat subuh, dzuhur, ashar, dan isya tidak kami hitung karena jumlah 850 itu sudah termasuk kategori orang yang akan jamaah pada sholat maghrib.

Kemudian untuk ukuran *kedua*, yakni di luar kesantrian adalah umat Islam total yang ada di desa Klepu, yakni 1327 dikurangi delapan 850 yang santri ($1327 - 850 = 477$ orang). Jadi jumlah yang diluar kategori santri sekitar 477 orang. Jumlah ini disebut kelompok abangan (Islam *marmoyo*). Diantara jumlah 850 dan 477 ini, apakah forum masjid banyak berpihak kepada yang jumlah 850? Jawabnya tidak selalu. Kendati jumlah 447 itu adalah abangan, terkait penggunaan isu agama dalam hal urusan politik, 447 itu lebih dekat ke Islam santri dari pada ke Katolik. Hal ini terbukti yang terjadi pada momen pemilu desa pasca Albertus Agung Pramono pada 2015. Bagaimana ini bisa terjadi?

Salah satu yang menjadikan mereka lebih dekat ke komunitas Islam santridari abangan adalah peran “kapital ekonomi” yang diprogram oleh forum masjid. Kapital ini penting dalam struktur kehidupan masyarakat karena mereka adalah masyarakat petani dan buruh tani yang dalam ukuran ekonomi termasuk menengah ke bawah. Dengan struktur ini, jika ada figur yang terlihat berpotensi untuk memudahkan mereka dalam hal ekonomi, figur itu akan menjadi perhatian penting bagi mereka.

Kapital ekonomi ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi memancing kesan tersendiri. Forum masjid, dengan iuran anggota 200 ribu per bulan, membelanjakan kambing satu pasang untuk diberikan secara cuma-cuma kepada para abangan selain juga para santri, yang dalam kelas ekonomi termasuk menengah ke bawah. Dari dua pasang kambing tersebut, pihak yang memelihara akan mengambil keuntungan dari hasil peranakan dua pasang kambing tersebut. Peranakan itu merupakan hasil keuntungan pihak

pemelihara dan mereka tidak punya kewajiban mengembalikan satu pasang kambing modal yang telah diberikan kepadanya.

Dari iuran 200 ribu per masjid selama satu tahun, terhimpun dana sekitar Rp.40.800.000.¹⁷ Jumlah ini kemudian dibelikan kambing dengan rata-rata harga per pasang Rp.2.500.000,- dan akan diperoleh 16 pasang. Jumlah 16 pasang tersebut akan dibagikan kepada komunitas Islam secara bergantian. Komunitas yang diidentifikasi oleh forum sebagai orang yang layak menerima bantuan ini, akan diberi secara cuma-cuma, yang pembagiannya dimulai pada bulan hari raya Idul adha.

Aktivitas kapital ekonomi ini mereka sebut dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*). Namun, penting untuk dicatat, bahwa pemberdayaan ini adalah memberdayakan komunitas Islam saja dan bukan kepada komunitas rakyat miskin yang ada di Katolik. Alasan yang dibuat sederhana. “Jika kami menyumbangkan kambing ini kepada komunitas Katolik, kami khawatir akan disebut sebagai misionaris sebagaimana jika mereka memberi bingkisan kepada komunitas Islam kami curigai sebagai langkah misionaris pula. Masing-masing punya strategi sendirilah untuk umatnya”, demikian ungkap ketua forum masjid. Oleh karena itu, makna pemberdayaan adalah penguatan komunitas agama berhadapan dengan komunitas agama lain dan bukan penguatan kemanusiaan, sehingga ketika mereka nanti berdaya, hal itu akan menjadikan forum masjid lebih punya kuasa karena itu adalah perannya. Hal ini mirip *money politic*, kendati tidak persis. Dikatakan demikian karena salah satu objek bantuan bukan didasarkan pada segi kebutuhan sosial dan karena objek memang perlu dibantu, tetapi lebih didasarkan pada sentimen teologis keagamaan. Jika ini bermakna pemberdayaan, tentunya objek bantuan itu lebih didasarkan pada aspek sosial seperti kemanusiaan. Jika atas dasar sosial dan kemanusiaan, tentunya bantuan itu tidak hanya kepada tubuh komunitas muslim karena banyak yang dari komunitas katolik yang menjadi buruh tani dan kerja *serabutandan* mereka juga layak untuk mendapat bantuan itu secara sosial dan kemanusiaan.¹⁸

¹⁷Jumlah dana ini dirinci dalam satuan angka $200.000 \times 17 \times 12 = 40.800.000,-$. Angka 17 adalah jumlah masjid yang ada dan angka 12 adalah jumlah penghimpunan dalam satu tahun.

¹⁸Namun penting untuk dicatat, bahwa jumlah abangan dalam komunitas Katolik juga

Oleh karena itu, modus kapital ini disebut sebagai kapital ekonomi yang menjadi bagian integral dalam perspektif kontestasi karena kepentingan forum masjid sangat terlihat dalam hal ini, yakni hasil akhir dari segenap bantuan yang mereka namakan pemberdayaan adalah memperkuat posisi forum dalam psikologi komunitas muslim, demi keabsahan manuver politik yang akan dimainkan forum dalam arena politik desa. Dengan demikian, kapital ekonomi ini adalah bagian integral juga dari cara-cara mereka berkuasa dan menguasai anggota sesama muslim, sebagaimana diungkapkan oleh Nietzsche tentang “*will to power*” (kehendak untuk berkuasa). Pertautan antara politik dan ekonomi demi tujuan kekuasaan inilah yang akhirnya membentuk “*economic reason*” (nalar ekonomi).¹⁹

Kemudian pada sisi “kapital simboliknya” adalah larangan membicarakan isu sekte atau kebenaran aliran yang diwujudkan dalam bentuk visi forum masjid yang berbunyi “berdiri di atas semua golongan”. Simbol ini memainkan psikologi tersendiri bagi para *abangan* untuk tidak merasa dihakimi ke-Islamannya oleh

banyak. Dengan adanya bantuan ekonomi ini, menurut pengakuan Mustakim ada yang konversi ke Muslim. Wawancara dengan Mustakim 13 April 2017.

¹⁹Penting untuk kami beri catatan dalam hal ini, bahwa cara berkuasa dan menguasai dalam perspektif kontemporer adalah bukan lagi dengan kekerasan dan menundukkan manusia dengan kekuatan fisik sebagaimana dalam pengertian konvensional, tapi dengan cara menyediakan media yang dipersiapkan oleh pihak yang akan berkuasa agar pihak yang akan dikuasai menerima media itu. Ketika mereka menerima itu maka proses selanjutnya yang akan terjadi adalah mereka akan dididik, diarahkan, diperadabkan, bahkan diracik lagi agar mengerti tentang arah yang benar, namun arah yang memang diinginkan oleh pihak yang akan berkuasa. Proses mendidik, mengarahkan, dan memberadapkan itu kemudian menjadi formasi nalar yang akan menjadi bentuk struktur nalar bagi keduanya. Ketika tugas ini selesai maka terbentuklah nalar kekuasaan yang dipakai terus menerus sebagai cara berkuasa dari generasi ke generasi. Awal dari proses pembentukan ini semua salah satunya dari kapital ini, karena dalam kapital ekonomi ini secara jelas memperlihatkan media agar pihak yang akan dikuasai masuk dalam jaring media tersebut. Kemudian istilah *capital reason* ini kami gunakan karena terjadinya perjumpaan antara kapital dalam ilmu ekonomi dengan kehendak untuk menguasai. Perjumpaan tersebut kemudian kami sebut dengan “*economic reason*”.

muslim masjid. Hal ini memancing simpati para *abangan* setelah sebelumnya isu kebenaran aliran itu dimunculkan oleh kelompok DDI. Larangan membicarakan atau bahkan memaksakan kebenaran aliran, yang merupakan aturan forum, menjadikan sekat psikologis antara santri dan *abangan* menjadi sedikit hilang dan menjadikan mereka lebih dekat kepada forum masjid daripada ke Katolik. Kemasan visi tentang “berdiri di atas semua golongan” ini merupakan “kapital simbolik” yang cukup efektif untuk menghilangkan sekat psikologis tersebut sehingga kelompok *abangan* lebih rapat kepadanya.

Kekuatan kata-kata yang ada dalam slogan tersebut seolah-olah para anggota forum tidak perlu bersentuhan langsung dengan para komunitas *abangan*. Mereka tunduk di bawah pengaruh atau masuk dalam pengaruh forum masjid. Simbol itu cukup menjadikan pendengarnya merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari forum itu. Oleh karena itu, ia merupakan simbol penghilang sifat kritis massa yang mungkin saja terlontar kepadanya dan menjadikannya menerima kuasa dari forum tersebut (Bourdieu, 1991:163-170).²⁰

Dari sisi internal forum, kuasa simbol itu diperkuat dengan mengotak-atik sejarah kenabian agar sejarah itu relevan dan mendukung terhadap slogan atau simbol yang sedang dijaga tersebut. Misalnya, “Nabi adalah figur yang bisa mengatasi perbedaan golongan”, “Nabi adalah peletak piagam madinah”, oleh karena itu nabi adalah juga figur yang sama dengan “berdiri di atas semua golongan”. Fatwa dan khotbah yang berisi sejarah kenabian yang selaras dengan visi tersebut seringkali terdengar oleh penulis ketika hadir dalam pertemuan dan mengikuti pengajian di tempat forum masjid mengadakan pertemuan rutin. Hal ini karena hasil dari musyawarah yang ada di forum masjid, yang jauh-jauh hari sebelumnya merancang materi khusus agar para da’i dan isi pengajian, mendukung tentang visi tersebut. Akhirnya visi ini menjadi populer di mata masyarakat dan menjadi slogan yang melekat pada forum masjid.

²⁰Penggunaan symbol sebagai cara berkuasa, dengan media kata-kata mutiara dalam istilah Bourdieu disebut dengan Doxa. Dalam kerangka ini masyarakat masuk dalam kesadaran palsu yang pada hakikinya ada satu mekanisme terselubung dalam doxa tersebut yakni berlangsungnya kuasa-kuasa pada rezim tertentu dan untuk bertahanya kuasa.

Dari aspek slogan atau simbol ini, apa yang menyesatkan di dalamnya? Pertanyaan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis. Hal ini penting karena dalam slogan itu tersimpan satu kekuatan magis yang menjadikan pendengarnya terdiam menerima tanpa sikap kritis kepadanya.

Kapital simbol dalam bentuk slogan ini dalam pemikiran Bourdieu disebut dengan *doxa*. Orang yang menerima tanpa sikap kritis kepadanya disebut dengan orang yang hidup dalam *Doxa*. Jika kita ingin keluar dari *Doxa*, maka penting memperhatikan secara teliti apa dibalik *Doxa* tersebut dan darimana asal muasal kekuatan magisnya? Salah satu cara membongkar *Doxa* dalam slogan tersebut adalah dengan melihat cara-cara para ahli fatwa dan juru da’i menguatkan argumennya untuk mengukuhkan kebenaran slogan. Di antara penguat argumen itu adalah dengan mendasarkan pada masa kenabian. Ungkapan-ungkapan yang sering terlontar dalam dakwah seperti Nabi adalah figur yang berdiri di atas semua golongan, Nabi juga pencetus Piagam Madinah, dan sebagainya sering kali terdengar dalam mimbar-mimbar dan pengajian yang ada serta dalam rapat-rapat resmi forum sehingga antara slogan pengusungnya seolah sama dengan Nabi. Karena sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka apa yang mereka lakukan menjadi lebih mantap dan meyakinkan. Namun, justru di sini persoalannya. Nabi adalah benar tapi cara kita membaca sejarah kenabian itu yang penting untuk dilihat. Oleh karena itu, bukan soal Nabi itu telah berdiri di atas semua golongan, bukan pula masalah Nabi itu pencetus Piagam Madinah, tapi soal cara mereka mengutip sejarah dan cara mereproduksinya. Cara produksi kebenaran itu memiliki kepentingan politik di baliknya, yakni merancang satu mekanisme kuasa agar simbol tersebut menjadikan forum tetap absah di mata para pengikutnya sebagai pembawa kebenaran.

Karena masa kenabian adalah masa yang sangat jauh dan terbentang lama serta terjadi sekali seumur hidup. Jarak antara da’i dan ahli fatwa dengan masa kenabian juga sangat jauh. Namun, sejarah masa Nabi yang sangat jauh tersebut coba dihadirkan ulang di masa kehidupan sekarang. Sejarah tersebut dibaca dan diseleksi agar masa kenabian tersebut seolah hadir lagi di masa sekarang dan memang sama dengan apa yang dilakukan oleh forum. Proses ini melibatkan hasrat sang pembaca, karena pembaca sejarah tidak hadir pada masa kenabian

tersebut. Elemen ketidakhadiran menjadikan pembaca sejarah memilih-milih apa yang dia ketahui ketika pengetahuannya tentang sejarah itu dicocok-cocokkan dengan visi dan kepentingannya yang ada pada masa kekinian. Hal itu menyebabkan proses pembacaan sejarah kenabian tersebut melibatkan unsur masa lalu dan masa kini dan menjadikan masa lalu sebagai sumber otoritasnya agar kekiniannya dianggap absah dan benar (Jabiri, 2001: 8-12).²¹

Siapa yang tahu persis tentang detail-detail masa kenabian, getaran emosionalnya, gejolak yang ada pada waktu itu, situasi dan kondisi yang sesungguhnya? Di sinilah apa yang dikatakan oleh Nietzsche, mereka membuka-buka lembaran sejarah dengan tujuan “*will to know*” (ingin mengetahui). Setelah tahap tahu tentang sejarah tersebut tercapai maka tumbuhlah “*will to truth*” (keinginan untuk benar). Setelah ini dicapai, yakni masyarakat membenarkannya dan dianggap sebagai forum yang benar, maka tahap selanjutnya adalah “*will to power*” (keinginan untuk menguasai). Adanya keterlibatan komunitas Islam yang banyak mendukung manuver politik forum masjid inilah maka tahap ketiga, yakni “*will to power*” telah tercapai. Ketercapaian ini juga menandai terjadinya peralihan agama dari yang sifatnya privat kemudian menjadi publik. Forum masjid telah menjadi ruang publik yang sangat penting bagi komunitas muslim dalam hal menemukan identitas baru, yakni agama publik, yang salah satunya dicapai dengan mengotak-atik masa lalu.

Penutup

Dari analisis tentang kontestasi komunitas muslim dihadapan umat Katolik di atas, maka tulisan ini bisa menyimpulkan dua hal.

Pertama, kapital simbolis dari forum masjid ini berasal dari kelas terdidik dan secara ekonomi tergolong kelas menengah (*middle class*). Jenis kapital ini memungkinkan mereka mempunyai pengaruh ditingkat masyarakat. Salah satu indikator mereka punya pengaruh itu

²¹Ungkapan ini menimba inspirasi juga dari cara baca Muhammed Abid al-Jabiri dalam analisisnya tentang simbol “kebangkitan” yang coba dimainkan oleh gerakan Islam kontemporer. Sebutan nahdlah begitu kuat melekat pada gerakan Islam politik yang mana dibalik sebutan itu ada sumber otoritas yang diperoleh melalui mengotak-atik sejarah. Dalam proses mengotak-atik itu sejarah diberlakukan dengan cara ada yang sering ditonjolkan, didiamkan, disebut-sebut demi meyakinkan pembaca.

adalah kepercayaan masyarakat untuk memposisikannya menjadi *ta'mir* masjid. Dari posisi *ta'mir* ini, mereka menjadi elit pemicu kecenderungan massa (elit strategis), yang darinya memungkinkan mereka untuk memainkan isu politik. Salah satu hasil dari isu politik forum ini adalah isu agama. Isu ini dimainkan untuk tercapainya komposisi pemerintahan desa berbasis agama Islam. Letak keberhasilannya adalah terpilihnya kepala desa Muslim yang pada masa sebelumnya selalu dari Katolik. Dari *capital symbol* ini mereka mencoba memadukan antara “yang agama” dan “yang politik”. Perpaduan keduanya ini menjadikan agama yang pada awalnya bersifat privat menjadi bersifat publik.

Kedua, bentuk kapital yang digunakan untuk meraih keberhasilan manuver tersebut adalah kapital ekonomi dan simbol slogan *Doxa*. Kapital ekonomi berupa agenda pemberdayaan berbasis agama dalam bentuk bantuan modal berupa ternak kambing. Sedangkan kapital simbol *Doxa* yang menjadi slogan mereka adalah “berdiri di atas semua golongan”. Slogan ini menjadikan sekat aliran teologis yang ada di tubuh Islam seperti NU, Muhammadiyah, DDI, Islam abangan (Islam *marmoyo*) dan Jamaah salafi lebur menjadi satu untuk membentuk ruang publik bersama. Dari kapital ekonomi ini, Islam menjadi persoalan sosial dan bukan lagi persoalan teologis. Kemudian dari kapital ekonomi itu menunjang terhadap *survivenya* ruang publik untuk menjadi forum bagi komunitas muslim dalam mengarahkan, menjinakkan, dan menuntun ke wilayah politik. Hal ini menjadikan persemaian bibit yang subur untuk merubah agama dari yang awalnya privat menjadi publik.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Muslim. (1997). *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. (2001). *Khitab al-'Arab al-Mu'ashir: Dirasat Tahliiliyat Naqdiyati*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah.
- Azra, Azumardi. (2000). *Islam Substanti*. Bandung: Mizan.
- Baso, Ahmad. (2015). *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Afid.
- _____. (2016). *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama*,

- Kolonialisme dan Liberalisme*. Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Afid.
- Bourdieu, Pierre. (1996). *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*. Translated by Richard Nice. USA: Harvard University Press.
- _____. (1991). *Language And Symbolic Power: Edited And Introduced by John Thompson*. Ttp: Polity Press.
- Calhoun, Craig (ed.). (1992). *Habermas And Publik Sphere*. London: MIT Press Cambridge Massachussets.
- Hamdi, Ahmad Zainul. (2008). *Meraba Konflik Umat Beragama: Tragedi Kabel Mik*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Haryanto, Dhesi. (2015). “*Integrasi Antar Umat Beragama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabuoaten Ponorogo*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- J. Richardson. (1986). *Form of Capital Pierre Bourdieu. Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*. Westpot CT: Greenwood.
- Madjid, Nurcholis. (1997). *Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Maksum, Imam. (2003). “*Kerukunan Antar Umat Beragama Islam dan Katolik di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurchahyo, Sigit. (2016). “*Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi Jurusan Tarbiyah Stain Ponorogo.
- Prahara, Erwin Yudhi. (2014). Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Cendekia* Vol. 14 No. 1, Januari - Juni 2016, hlm. 19-32.
- Rahman, Budhi Munawar. (2001). *Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Salahudin, Marwan. (2010). “*Konservasi Budaya Lokal Dalam Pembentukan Harmoni Sosial Studi Kasus di Desa Klepu Sooko Kabuoaten Ponorogo*”. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol IX No. 34 Tahun 2010.
- Shihab, Alwi. (1997). *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Swartz, David L. (2002). *The Sociology Of Habit: The Perspective Of Pierre Boerdieu*. The Occupational Therapy Journal Of Research. Volume 22, Winter 2002.
- Wahid, Abdurahman. (1996). *Pergulatan agama, Negara, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara.